

UIN : ONTOLOGIS, EPISTEMOLOGIS DAN AKSIOLOGIS

**Oleh :
Lazuardi¹**

Abstract

Transforming IAIN to UIN is a scientific project. So the crucial thing to do is to reform scientific paradigm to the new scientific paradigms based on integrality. At last, the graduations will have academic competence, innovative and can guide people in the spirit of science and religion.

Keywords: UIN, Ontology, Epistemology and Axiology

¹ Lazuardi adalah Dosen Jurusan Dakwah STAIN Padangsidempuan

Pendahuluan

Universitas Islam Negeri (UIN) merupakan bentuk final dari Perguruan Tinggi Islam Negeri yang ada di Indonesia meskipun sampai hari ini masih banyak yang berbentuk IAIN dan STAIN akan tetapi semuanya akan berproses (*on going proses*) menuju alih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Perubahan status dari sekolah menjadi institut dan institut menjadi universitas merupakan konsekuensi dari berbagai perubahan-perubahan yang begitu cepat, baik dalam konteks nasional maupun global. Tentu sebagai bagian yang integral dari sistem Pendidikan Nasional UIN tidak dapat mengisolasi diri dari perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam konteks global orientasi baru pengembangan Pendidikan Tinggi sebagaimana dirumuskan dalam Deklarasi UNESCO tentang Perguruan Tinggi pada Tahun 1998 merupakan momentum dan peluang penting bagi UIN untuk mengevaluasi diri dengan mempertimbangkan perubahan dan transisi social, ekonomi dan politik nasional dan global. Di sisi lain otonomisasi sebagai paradigma baru penyelenggaraan pendidikan juga membuka peluang bagi Perguruan Tinggi termasuk STAIN, IAIN dan UIN melakukan pembenahan-pembenahan. Terjadinya krisis moneter yang disusul dengan krisis ekonomi, politik dan social menurut Azra tidak saja menimbulkan keprihatinan mendalam tentang meningkatnya *drop-out rate* di kalangan mahasiswa tetapi juga tentang semakin merosotnya efektivitas dan efisiensi Perguruan Tinggi dalam menghasilkan mahasiswa dan lulusan yang *competitive advantage* memiliki daya saing yang handal dan tangguh dalam zaman globalisasi yang penuh tantangan.²

²Azyumardi azra, *IAIN di Tengan Paradigma Baru Perguruan Tinggi*, dalam Komaruddin Hidayat, Hendro Prasetyo(Ed), *Problem dan Prospek IAIN Antologi Pendidikan Tinggi Islam*,(Jakarta : Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2000), h. 3

Proses alih status bukanlah pekerjaan mudah karena pengembangan dan konversi IAIN ke UIN bukan proyek fisik melainkan proyek keilmuan. Proyek pengembangan wawasan keilmuan dan perubahan tata pikir keilmuan yang bernafaskan keagamaan transformatif, jadi tidak asal berubah tanpa landasan dan tujuan.. Konversi IAIN ke UIN adalah momentum penting untuk membenahi dan menyembuhkan luka “dikhotomi” keilmuan umum dan agama. Oleh karena itu Pendidikan Islam khususnya lembaga-lembaga pendidikan Islam disamping menghadapi tantangan konsepsi keilmuan juga menghadapi tantangan ideologis terkait dengan krisis kemanusiaan multi-dimensi.

Dengan demikian konversi adalah sesuatu yang tak terelakkan dengan berbagai tantangan yang mesti direspon sesuai dengan irama perubahan. Perubahan-perubahan fundamental harus dilakukan sebagai antisipasi ke masa depan sesuai dengan kecenderungan perubahan. Tentu hal yang mendasar adalah peluang pemantapan visi dan misi UIN yang secara ontologis dapat diandalkan, demikian halnya epistemologi keilmuannya yang sesuai dengan pandangan fundamental Islam serta dapat memenuhi tuntutan masyarakat. Sehingga pola universitas yang akan diselenggarakan memenuhi tuntutan masyarakat tanpa kehilangan basis spiritualitas. Untuk itu makalah ini berupaya melihat konversi IAIN menuju universitas dari kacamata ontologis, epistemologis dan aksiologis.

Transformasi Menuju UIN Telaah Ontologis

Secara Historis konversi status IAIN menjadi UIN telah dimulai sejak diserahkannya SK Presiden tentang konversi IAIN Syarif Hidayatullah

menjadi UIN pada Tahun 2002.³ Dua tahun kemudian disusul IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan STAIN Malang menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim pada Tahun 2004.⁴ Selanjutnya bertambah tiga lagi yaitu IAIN Riau menjadi UIN Syarif Qasim Riau, IAIN Bandung menjadi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan IAIN Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar. Kerangka pengembangan awal dan konversi terkontekstualisasi pada IAIN Jakarta dan IAIN Yogyakarta dengan pertimbangan kondisi dan situasi dengan harapan cocok untuk diadopsi IAIN-IAIN lain.

Dari 53 jumlah PTAIN Yang ada di Indonesia yang dirintis sejak Tahun 1960 oleh masyarakat dan Pemerintah 6 diantaranya telah mengkonversi diri menjadi Universitas dengan kekhasan Islam yang melekat pada institusi. Hal ini bermakna bahwa PTAIN lainnya akan berupaya mengalihkan statusnya menjadi UIN seiring dengan bergulirnya spirit reformasi di dunia pendidikan, dan perubahan-perubahan global.

Sebagai bagian yang integral dari system pendidikan nasional maka PTAIN, IAIN dan STAIN dalam proses alih statusnya sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan nasional dan internasional. Salah satu perubahan dimaksud adalah tentang perumusan paradigma baru Pendidikan Tinggi di Tanah Air. Pengkajian ulang terhadap kinerja PT dapat dilihat dari kerangka yang diajukan oleh D.A. Tisna Amijaya sebagaimana dikutip Azra yang mengidentifikasi lima masalah besar yang dihadapi PT pada umumnya. *Pertama*, produktivitas yang rendah; *kedua*, keterbatasan daya tampung; *ketiga*, keterbatasan kemampuan berkembang; *keempat*, kepincangan diantara berbagai PT; *kelima*, distribusi yang tidak seimbang dalam bidang-bidang ilmu

³ Surat Keputusan Presiden RI Nomor. 031 tentang Perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁴ Surat Keputusan Bersama Mendiknas RI dan Kemenag RI No:1/0/SKB/2004; Nomor : ND/B.V/I/Hk.00.1/04 tentang Perubahan Menjadi UIN.

yang disediakan khususnya di antara ilmu-ilmu social dan humaniora dengan ilmu-ilmu eksakta. Untuk mengatasi itu Amijaya sebagaimana dikutip Azra menawarkan lima program besar. Pertama, peningkatan produktivitas PT; kedua, peningkatan daya tampung; ketiga, peningkatan pelayanan kepada masyarakat; peningkatan bidang keilmuan eksak atau iptek; kelima, peningkatan kemampuan berkembang.⁵

Nampaknya kerangka di atas tidak banyak memberikan perubahan karena persoalan-persoalan internal PT sendiri dan kebijakan Pendidikan Nasional yang sangat sentralistik. Maka program-program besar pengembangan PT kembali dirumuskan yakni, *pertama*, peningkatan kualitas PT; *kedua*, peningkatan produktivitas; *ketiga*, peningkatan relevansi; *keempat*, perluasan kesempatan memperoleh pendidikan. Program-program ini mengilhami lahirnya paradigma baru Pendidikan Tinggi sebagaimana termuat dalam Rencana Jangka Panjang Ketiga (1996-2005) yang memuat tentang komponen-komponen penting yaitu peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan, meliputi manajemen, otonomi, akuntabilitas dan akreditasi.⁶

Gagasan paradigma baru PT muncul dengan dikeluarkannya “ World Declaration on Higher Education for the Twenty first Century : Vision and

⁵ Azyumardi Azra, dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro., *Ibid*, h. 7

⁶ Paradigma baru pengembangan PT dalam konteks Nasional didorong oleh krisis moneter, ekonomi dan politik sejak 1997 yang mempengaruhi perubahan paradigma seluruh aspek pendidikan pendidikan seperti, filosofi dan kebijakan pendidikan nasional, system pendidikan berbasis masyarakat (community- based education); pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan; manajemen berbasis sekolah(school based-management); implementasi paradigm perguruan tinggi; dan system pembiayaan pendidikan. Para perumus konsep reformasi pendidikan nasional merekomendasikan perlunya adopsi dua strategi yaitu defensive strategy dan recoveri strategi. Yang pertama bertujuan untuk mempertahankan prestasi yang telah dicapai di masa silam dan berupaya meningkatkan segala sesuatu yang baik. Strategi pemulihan bertujuan memulihkan kembali pendidikan nasional dari berbagai krisis yang masih bertahan beberapa tahun ke depan.Lihat, Azymardi Azra, dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro, *Ibid*, h. 7

Action oleh UNESCO yang memuat hal-hal mendasar aksi dan fungsi PT di abad 21. Pertama, bahwa misi dan nilai pokok PT adalah memberikan kontribusi kepada pembangunan yang berkelanjutan dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Kedua, memberikan berbagai kesempatan kepada para peminat untuk memperoleh pendidikan tinggi sepanjang usia. Ketiga, memajukan, menciptakan dan menyebarkan ilmu melalui riset, dan memberikan keahlian yang relevan untuk membantu masyarakat umum dalam pengembangan budaya, social, ekonomi; mengembangkan penelitian dalam bidang sains dan teknologi, ilmu-ilmu social, humaniora dan seni kreatif. Keempat, membantu untuk memahami, menafsirkan, memelihara, memperkuat, mengembangkan dan menyebarkan budaya-budaya historis nasional, regional, dan internasional dalam pluralism dan keragaman budaya. Kelima, membantu untuk melindungi nilai-nilai social dengan menanamkan kepada generasi muda nilai-nilai yang membentuk dasar kewargaan yang demokratis. Keenam, memberikan kontribusi kepada pengembangan dan peningkatan pendidikan pada seluruh jenjang termasuk pelatihan guru. Bahkan yang tidak kalah pentingnya dari deklarasi tersebut adalah tentang peran etik, otonomi, tanggungjawab dan fungsi antisipatif Perguruan Tinggi.⁷

Dalam konteks Nasional konsep pengembangan PT dapat dilihat dari rumusan yang dibuat oleh Departemen Pendidikan Nasional yang bertumpu pada tiga tungku utama yaitu, pertama, kemandirian dalam pengelolaan atau otonomi yang luas. Kedua, akuntabilitas atau tanggungjawab tidak saja dalam hal pemanfaatan sumber-sumber keuangan secara lebih bertanggungjawab tetapi juga dalam pengembangan ilmu, kandungan pendidikan dan program-program yang diselenggarakan. Ketiga, jaminan lebih besar terhadap kualitas

⁷ UNESCO, *World Declaration On Higher Education adopted by the World Conference On Higher Education in the Twenty-First Century*, 9 October 1998

melalui evaluasi internal yang dilakukan secara berkesinambungan; dan evaluasi eksternal yang dilakukan oleh BAN PT. Ketiga tungku paradig baru tersebut saling terkait satu sama lain yang mesti diaktualisasikan secara simultan sebab, jika tidak maka perguruan tinggi akan tetap menghadapi berbagai persoalan dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagaimana konsep rumusan paradig baru Pendidikan Tinggi.

Sabagai bagian yang tak terpisahkan dari sistim Pendidikan Nasional sekali lagi UIN tidak dapat mengisolasi dari perubahan-perubahan tersebut di atas. Paradigma baru PT di atas menjadi acuan bagi UIN yang mesti berani mengadakan perubahan-perubahan esensial secara priodik. Jika UIN lamban melakukan perubahan, lembaga ini akan ditinggalkan. Karenanya UIN harus berupaya melakukan pengkajian dan evaluasi karena secara eksternal dan internal UIN masih menghadapi berbagai masalah.

Menurut Didin Syafaruddin secara internal masalah-masalah mendasar yang dihadapi tampaknya berkenaan dengan visi yang menjadi hambatan dalam pengembangan disebabkan oleh adanya kecenderungan kuat untuk melahirkan ahli yang memiliki keahlian dua bidang agama dan bidang umum. Padahal waktu yang dirancang untuk itu sama dengan Pendidikan Tinggi pada umumnya.⁸ Justru itu menurut Azra bahwa gagasan dan konsep pengembangan IAIN menjadi UIN bertitiktolak dari masalah-masalah mendasar dan filosofis yaitu, pertama , IAIN belum berperan secara optimal dalam dunia akademik, birokrasi dan masyarakat. Ketiga lingkungan itu kelihatan peran IAIN lebih besar pada masyarakat karena kuatnya orientasi kepada dakwah daripada pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, kurikulum IAIN belum mampu merespon perkembangan iptek dan perubahan

⁸ Didin Syafruddin, *Meninjau keberadaan Fakultas Tarbiyah*, dalam Komaruddin Hidayat, Hendro Prasetyo(Ed), *Ibid.*, h. 137

masyarakat yang semakin kompleks. Hal ini disebabkan terutama karena kajian agama yang merupakan spesialisasi IAIN kurang berinteraksi dengan ilmu-ilmu umum bahkan cenderung dikhotomis. Kurikulum IAIN masih terlalu berat kepada yang bersifat normatif. Sedangkan ilmu-ilmu umum yang akan mengarahkan mahasiswa kepada ilmu-ilmu empirik dan kontekstual masih sangat lemah.⁹ Oleh karena itu secara epistemologis konversi IAIN menjadi UIN sesungguhnya merupakan proyek keilmuan yang berupaya mengintegrasikan dua bidang ilmu dalam satu atap sehingga tidak ada dikhotomi ilmu pengetahuan.

Kondisi ini dibenarkan oleh Amin Abdullah, menurutnya ada tuntutan ganda terhadap PTAIN di Tanah Air. Pertama, berkaitan erat dengan eksistensinya sebagai lembaga keilmuan yang dituntut untuk mengajarkan, meneliti, mengembangkan ilmu pengetahuan agama Islam. Kedua, tuntutan yang terkait dengan kelembagaan IAIN sebagai lembaga keagamaan Islam yang barang tentu mempunyai dasar pemikiran yang berbeda dari tuntutan pertama. Yang pertama lebih berorientasi pada dunia pemikiran dan analisis-kritis yang menuntut seseorang menjadi "historian" (*muarrikh*). Sedangkan yang kedua lebih pada pemihakan dan pemegangan secara teguh pada pandangan hidup tertentu yang menuntut seseorang menjadi seorang *believer* (mukmin yang taat dalam menjalankan agama). Menurut Amin lebih lanjut bahwa hal ini sangat jauh berbeda dengan eksistensi PT sejenis semacam IKIP dan ISI, tampaknya IAIN mengalami sebuah dilema. Dilema tersebut tidak dalam bentuk keabsahan eksternal kelembagaannya namun lebih merupakan dilema internal psikologis yang tercermin dalam bentuk ketegangan antara misi keilmuan dan misi keagamaan. Namun menurut beliau ketegangan ini

⁹Azyumardi Azra, *IAIN di Tengah Paradigma Baru Perguruan Tinggi*, dalam Komaruddin Hidayat, Hendro Prasetyo(Ed), *Ibid.*, h.13.

tidak perlu dirisaukan karena di dalamnya terkandung dinamika dialektis yang memberikan manfaat bagi kedua sisi. Masing-masing mempunyai fungsi dan perannya sendiri tanpa harus mengetepikan yang satu dengan lainnya persis seperti koin yang mempunyai dua permukaan.¹⁰

Demikianpun, transformasi IAIN kepada UIN masih menyimpan berbagai persoalan terutama pada bidang kelembagaan, sarana, fasilitas dan ketersediaan sumber daya dosen yang secara epistemologi Islam dapat memenuhi jurusan-jurusan dan fakultas umum baru. Persoalan ini juga sangat terkait dengan ketidakleluasaan atau adanya pembatasan UU Sisdiknas yaitu Diknas mengelola ilmu-ilmu umum sedangkan Kementerian Agama mengelola ilmu-ilmu agama.

Namun bagaimanapun pola yang akan dikembangkan oleh IAIN ke depan, menurut Mulyadi Kartanegara bahwa sebagai lembaga akademis yang menekankan pendekatan intelektual sekaligus sebagai lembaga religious yang menekankan spritualitas seharusnya UIN memiliki visi (cara pandang) ontologis metafisik yang handal. Hal ini menurutnya disebabkan oleh dua sebab fundamental. Pertama, serangan gencar dan radikal para ilmuwan, pemikir dan para filosof sekuler terhadap dunia metafisika. Kedua, adanya kebutuhan yang semakin mendesak bagi orang-orang modern, baik di Barat maupun di Timur terhadap bangun metafisika yang kokoh, tempat berlindung orang-orang yang beriman dan menjunjung tinggi spritualitas pasca perang dunia kedua.¹¹

Oleh karena itu dua sebab fundamental itu menjadi tugas penting UIN untuk mempersiapkan visi metafisis yang dapat mengayomi seluruh aliran

¹⁰ M. Amin Abdullah, *Falsafah kalam di Era Postmodernisme*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997), h. 17.

¹¹ Mulyadi Kartanegara, *Membangun Kerangka Ilmu: Perspektif Filosofis*, dalam Komaruddin Hidayat, Hendro Priyono, *Ibid.*, h. 247

metafisika yang pernah dikembangkan sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran pokok Islam.

Transformasi IAIN kepada universitas secara psikologis memunculkan berbagai kekhawatiran dan pertanyaan, mengapa harus menjadi universitas? Apakah tidak cukup dengan mempertahankan "institute" seperti selama ini? Bagaimana fakultas-fakultas yang selama ini dibina, dan bagaimana struktur keilmuan, kurikulum dan silabi pada prodi-prodi umum di UIN? Dan berbagai pertanyaan lainnya.

Untuk merespon kekhawatiran yang muncul Amin Abdullah memberikan empat jawaban yang secara ontologism dapat menjelaskan hakikat dan karakteristik UIN ke depan. Pertama berlandaskan kepada surat Mendiknas kepada Menteri Agama, tanggal 23 Januari 2004 yang menyatakan sebagai berikut: " Meskipun IAIN Sunan Kalijaga dan STAIN Malang berubah menjadi UIN Sunan Kalijaga dan UIN Malang, namun tugas pokoknya tetap sebagai institusi Pendidikan Tinggi bidang agama, sedangkan peyelenggaraan program non agama Islam (umum) merupakan tugas tambahan".¹² Berlandaskan pada penegasan surat tersebut bahwa tugas utama UIN adalah tetap sebagai lembaga pendidikan tinggi bidang agama (*main mandate*), sedangkan penyelenggaraan ilmu-ilmu umum merupakan tugas tambahan (*wider mandate*). *Wider mandate* ini tidak boleh menggeser tugas utamanya. Kedua, lima fakultas yang sejak awal berdiri akan tetap dipelihara, bahkan dalam kerangka konversi akan diperkuat dengan standar metodologi baru selevel dengan universitas lain dengan berbagai penyesuaian sehingga memiliki daya saing dan daya tawar. Ketiga, rancangan fakultas di bawah UIN akan disesuaikan dengan prinsip dasar "Miskin struktur, kaya fungsi".

¹²Surat Menteri Pendidikan Nasional yang diajukan kepada Menteri Agama RI tanggal 23 Januari 2004.

Karenanya untuk memperkuat fakultas agama dilakukan cara memadukan fakultas agama dengan program studi ilmu-ilmu sosial dan humaniora pada fakultas-fakultas yang ada sekarang. Sehingga fakultas-fakultas yang ada sekarang berubah nama menjadi : Adab, Dakwah, Syariah, Tarbiyah, Ushuluddin, Sains dan Teknologi serta Sosial dan Humaniora. Keempat, Konversi IAIN ke UIN akan memberikan ruang gerak yang lebih luas dibanding dengan Institut, karena universitas membidangi berbagai cabang disiplin keilmuan, baik eksakta, social maupun humaniora.¹³

Dengan demikian perubahan IAIN menuju UIN merupakan peluang besar bagi PTAIN yang ada di Indonesia. Sebagai lembaga akademis religius yang tak terpisahkan dari sistim Pendidikan Nasional kerangka perubahan UIN akan tetap mempertahankan tugas utamanya yaitu sebagai lembaga Pendidikan Agama dengan tugas tambahan menyelenggarakan program ilmu-ilmu umum.

Kajian Epistemologi

Salah satu persoalan fundamental yang dihadapi oleh UIN adalah tentang munculnya dikhotomi ilmu meskipun hal ini bukan barang baru dalam sejarah keilmuan yang telah berlangsung lebih dari seribu tahun. Pemisahan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum telah diperkenalkan oleh para ilmuan muslim klasik seperti al-Ghazali (w. 1111) dan Ibn Khaldun (w. 1406). Al-Ghazali misalnya menyebut ilmu-ilmu agama sebagai *al-ulum al-syari'yyah* dan ilmu-ilmu umum disebut dengan *al-ulum ghair al-syar'iyyah*. Sebenarnya al-Ghazali tidak memilah dan memisahkan dua ilmu tersebut hanya saja al-Ghazali lebih cenderung kepada ilmu-ilmu agama sebagai *fard 'ain* yang wajib bagi setiap muslim mempelajarinya dan ilmu-ilmu umum

¹³Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), h. 369.

sebagai *fard kifayah* menuntut dan mempelajarinya. Al-Ghazali sebenarnya tidak menolak keabsyahan dan ke-validitasan ilmu-ilmu umum dan tidak memandang ilmu-ilmu agama lebih unggul dan lebih valid. Ia memandang kedua bidang ilmu tersebut wajib dipelajari setiap muslim, bahkan cabang-cabang ilmu umum tertentu seperti logika dan matematika beliau anjurkan agar dipelajari secara baik.¹⁴ Hal ini membuktikan pengakuan al-Ghazali terhadap validitas ilmu-ilmu umum, karena itu ia tidak memilah dan memisahkan keduanya akan tetapi mencoba mengklasifikasikan dan penjenisan bidang ilmu.

Ibn Khaldun juga membagi ilmu pengetahuan kepada ilmu-ilmu agama sebagai *al-ulum al-naqliyah* yaitu ilmu yang belandaskan pada otoritas wahyu yaitu al-Quran dan Hadis sebagai penjelas (*tibyanan*). Hal ini menjelaskan bahwa sumber utama ilmu-ilmu ini adalah kitab suci yang diwahyukan kepada para Nabinya. Ilmu-ilmu yang masuk dalam kategori ini seperti *ulum al-Quran, hadis, tafsir, ilmu kalam, tasawuf* dan tafsir mimpi. Sementara itu ada kategori *ilmu-ilmu aqliyah* yaitu ilmu-ilmu yang didasarkan atas penalaran akal dan dalil rasional, termasuk filsafat (metafisika), matematika, fisika dan lain-lain. Ilmu-ilmu Naqliyah bertujuan untuk menjamin terlaksananya hukum syariah sedangkan ilmu-ilmu Aqliyah bertujuan untuk menjamin terlaksananya hukum syariat, sedangkan ilmu-ilmu rasional bertujuan untuk memperoleh pengetahuan teoritis tentang sesuatu sebagaimana adanya. Meskipun demikian, dalam pemilihan ini tidak tersirat sedikitpun keraguan apalagi penolakan status keilmiahan dari kelompok-kelompok ilmu tersebut. Ilmu-ilmu agama dipandangnya sangat perlu untuk membimbing kehidupan ruhani manusia, sementara ilmu-ilmu umum untuk membimbing kehidupan duniawi. Hanya saja, dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu agama, otoritas atau

¹⁴ Al-Ghazali, *Ihya Ulum al- Din*, Jilid, I, h. 17

peranan akal terhadapnya cukup terbatas, sementara terhadap ilmu-ilmu umum akal memiliki peran utama untuk meneliti dan memberikan putusan atas kebenaran-kebenaran capaiannya.¹⁵

Dalam khazanah intelektualisme Islam, dikhotomi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu non-agama tidak terlalu banyak menimbulkan masalah terhadap sistem pendidikan Islam. Akan tetapi, sejak sistem pendidikan sekuler Barat diperkenalkan ke dunia Islam melalui imperialisme dan kolonialisme, status keilmuan ilmu-ilmu keagamaan sering dipandang rendah. Mereka sering mengklaimnya sebagai ilmu yang tidak memiliki sifat ilmiah oleh karena berbicara tentang hal-hal *ghaib,quasi-ilmiah*. Sedangkan menurut kalangan Barat, ilmu baru dapat dikatakan ilmiah jika objek-objek kajiannya bersifat empiris. Artinya, dikhotomi yang sangat ketat antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu non-agama secara diametral terjadi di dunia Muslim terjadi ketika ilmu-ilmu sekuler empiric-positivistik diperkenalkan oleh kalangan imperialis dan kolonialis.¹⁶

Di sisi lain, dikhotomi ini semakin memuncak tatkala terjadi pengingkaran terhadap validitas dan status keilmiahan satu ilmu atas ilmu yang lain. Kalangan agamawan tradisional memandang bahwa ilmu-ilmu non-agama itu sebagai bid'ah atau haram dipelajari karena berasal dari orang-orang kafir. Sedangkan pendukung ilmu-ilmu non-agama menganggap ilmu-ilmu agama sebagai pseudo-quasi ilmiah atau hanya sebagai mitologi yang tidak akan mencapai tingkat ilmiah oleh karena tidak berbicara tentang fakta empirik.¹⁷

¹⁵ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Penerjemah Franz Rosenthal, (New Jersey : Princeton University Press, 1981), h. 342-344.

¹⁶ Mulyadi Kartanegara, *Integrasi Ilmu Sebuah Rekonstruksi Holistik*, (Jakarta, UIN Jakarta Press, Arasy Mizan, 2005), h.19.

¹⁷ *Ibid*, h. 20.

Dikhotomi atau sekulerisasi ilmu mendapat respon dari para ilmuwan muslim, Mulyadi Kartanegara misalnya menyebut bahwa sekulerisasi ilmu sangat berbahaya bagi umat beragama yang menggiring pemahaman kearah pengingkaran kepada Tuhan. Pemahaman ini akan menggiring para ilmuwan untuk mendiskreditkan agama dan mengagungkan ilmu pengetahuan secara berlebihan.¹⁸ Karena itu menurut S.M.Naqib al-Attas sekulerisasi ilmu tidak dibangun atas wahyu dan keyakinan agama akan tetapi semata-mata tergantung pada hasil pengetahuan manusia dalam memahami alam semesta. Pemahaman ini menurutnya lahir dari kebingungan dan kegelisahan yang mereka jadikan sebagai dasar metodologi ilmiah yang lahir dari tradisi Barat yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional.¹⁹ Akibatnya ilmu pengetahuan dan nilai-nilai etika dan moral cenderung berubah-ubah sebab dihasilkan panca indra dan rasio yang pada gilirannya telah menggiring peradaban dunia Barat menuju krisis yang berkepanjangan.²⁰ Ironisnya pemahaman ini merembet ke dunia Islam seiring dengan munculnya kolonialisme dan imperialism bangsa-bangsa Eropa di Negara-nagara Islam.

Oleh karena itu pandangan sekularisme ini merupakan tantangan berat bagi dunia Islam kontemporer dan tidak sepatutnya diterapkan di dunia muslim. Para sarjana muslim memandang bahwa hal ini merupakan sumber kekalutan yang dihadapi umat Islam. Sistem pendidikan sekuler sebagai sistem pendidikan telah mengakar di dunia muslim yang tidak saja mencederai maksud dan tujuan ilmu karena tercerabut dari pondasinya akan

¹⁸ Mulyadi Kartanegara, *Mengislamkan Nalar*, Op. Cit., h.9.

¹⁹ S.M. Naqib al-Attas, *Islam and Secularism*,(Kuala Lumpur:ISTAC, 1993), h. 137, SM. Naqib al-Attas, *Prolegomena to the Mrtaphysiecs of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldvieu of Islam*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), H.49.

²⁰ S.M. Naqib al-Attas, *Islam and secularism*, *Ibid.*, h.133-135.

tetapi sangat bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Karena akan menggiring manusia kepada kepribadian yang pecah (*split personality*).²¹

Memandang kondisi ini para sarjana muslim menganjurkan pentingnya menghidupkan kembali kesakralan ilmu pengetahuan. Hilangnya kesakralan ilmu pengetahuan menjadikan ilmu seperti patamorgana, justru di sinilah titik utama perbedaan konsepsi teori pengetahuan Barat dengan teori ilmu pengetahuan Islam.²² Karena itu para sarjana muslim sepakat dengan cara mengislamkan ilmu pengetahuan terlebih ilmu-ilmu modern meskipun tidak semua sarjana muslim sepakat dengan teori ini.

Namun teori ini tidak dapat dipahami tanpa dikaitkan dengan epistemologi yang melanda dunia Islam satu sisi dan di sisi lain perlu memahami tantangan sekularisasi di dunia barat yang telah membentuk *mindset* pendidikan Islam. Dengan demikian pemahaman terhadap dua ekstrim itu menjadi sangat penting agar tidak kehilangan makna dan relevansinya terhadap konsep Islamisasi ilmu.

Dalam konteks Pendidikan Tinggi Islam (UIN) di Tanah Air aktualisasi konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan (*Islamization of Knowledge*) mulai mendapat perhatian meskipun dengan term yang berbeda. Ada yang menyebut istilah “desakralisasi ilmu-ilmu agama” dan “sakralisasi ilmu-ilmu sekuler” yang oleh PPS IAIN Wali Songo disebut dengan “humanisasi ilmu-ilmu ke islaman” dan “sakralisasi ilmu-ilmu sekuler”. Melalui konsep seperti ini persoalan dikhotomi ilmu tidak menimbulkan masalah pada aspek filsafat ilmu, integrasi ilmu bahkan terhadap dualism system pendidikan di Indonesia. Upaya menghilangkan dikhotomi, Pemerintah menerbitkan SKB tiga menteri

²¹ Rosnani Hasyim, *Gagasan Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer, Sejarah Perkembangan, dan Arah Tujuan, dalam Islamiah Majalah Pemikiran dan peradaban Islam*, Thn I No 6 Juli- September 2005, h.29.

²² C.A. Qadir, *Philosophy and Science in the Islamic World* (London : Routledge, 1988), h.5.

pada tahun 1975 yang berupaya menggabungkan (integrasi) bidang keilmuan akan tetapi pada praktiknya dikhotomi tidak dapat dihindarkan, hal ini bermakna persoalan dikhotomi masih menjadi persoalan yang akut dan kompleks.

Untuk itu gerakan islamisasi ilmu terus disuarakan para sarjana muslim yang secara teologis lahir dari akidah islamiah dengan *worldview* qur'ani yang menyatakan semua ilmu berasal dari Yang Maha Tahu (*al-'Alim*). Al-Qur'an dengan jelas telah menggariskan semangat islamisasi ilmu sebagaimana terungkap dalam surah al'alaq 1-5).²³

Secara historis gerakan islamisasi ilmu terjadi sekitar abad ke-3 H. Para ilmuwan muslim merasakan adanya dikhotomi ilmu dan mencoba mengislamkannya sekaligus berupaya melahirkan ilmu-ilmu baru melalui observasi dan eksperimentasi. Karya monumental Al-Ghazali *Tahafut al-Falasifah* dipandang sebagai upaya islamisasi filsafat Yunani. Dalam buku tersebut al-Ghazali mengungkap 20 ide-ide yang dianggap asing dengan Islam dan 4 diantaranya bertentangan dengan akidah seperti kekekalan alam. Gerakan sejenis juga dilakukan oleh Fakhruddin al-Razi, Muhammad Iqbal dan Ismail al-Faruqi. Generasi intelektual lainnya adalah Louay Safi dan Ibrahim Ragab yang mengembangkan ide-ide al-Faruqi.

Sebenarnya gagasan islamisasi ilmu berawal dari pemikiran S.M Naquib al-Attas sarjana muslim kontemporer yang menegaskan pentingnya islamisasi pendidikan, sains dan ilmu pengetahuan yang beliau ungkapkan pada Pendidikan Islam Sedunia Pertama tahun 1977 di Mekkah yang dihadiri sekitar 313 sarjana dari dunia Islam.²⁴ Al-Attas berpandangan bahwa Islamisasi bukan berarti penolakan secara totalitas terhadap Barat, karena dalam tataran tertentu

²³ Q.S. al-'Alaq, 1-5

²⁴ Rosnani Hasyim and Imran Rossidy, *Islamization of Knowledge : A Comparative Analysis of the Conception of al-Attas and al-Faruqi*, dalam *Journal Intellectual Discourse* 8:1(2000), h.44.

ada persamaan antara Islam dan Barat khususnya yang terkait dengan sumber dan metode ilmu, kesamaan cara mengetahui hal yang rasionalistik dan empirik, kombinasi realistik, idealistik dan pragmatik sebagai fondasi filsafat sains dan prosesnya. Akar persoalan antara sekularisasi dengan islamisasi ilmu lebih didasarkan atas basis ontologi metafisis dan sumber pengetahuan. Bagi al-Attas wahyu merupakan sumber ilmu disamping panca indra dan akal. Wahyu merupakan sumber ilmu tentang realitas dan kebenaran akhir dan wahyu menjadi kerangka metafisis untuk menggali filsafat sains yang menyatakan kebenaran dan realitas dari sudut pandang rasionalisme dan empirisme.²⁵

Islamisasi ilmu bertujuan untuk melindungi masyarakat muslim dari ilmu yang tercemar, menyesatkan dan menimbulkan kekeliruan. Islamisasi juga bertujuan untuk mengembangkan ilmu hakiki yang dapat membangun pemikiran dan ruhani yang akan meningkatkan keimanan kepada Allah. Menurutnya kedua proses itu diharapkan dapat membebaskan manusia dari *magis, mitologi, animism* dan tradisi yang bertentangan dengan Islam, dan control sekuler terhadap akal dan bahasanya.²⁶

Sementara itu al-Faruqi menguraikan islamisasi ilmu dapat dicapai melalui pemaduan baru ke dalam khazanah warisan Islam dengan cara membuang, menata, menganalisa, menafsir ulang, dan menyesuaikannya dengan nilai dan pandangan Islam. Prinsip islamisasi harus berdasarkan pada tauhid sebagai kerangka pemikiran, metodologi dan cara hidup. Prinsip dasar tersebut adalah ke-Esaan Allah, kesatuan penciptaan, kesatuan kebenaran, kesatuan ilmu, kesatuan kehidupan dan kesatuan kemanusiaan.²⁷

²⁵ S.M. Naquib al-Attas, *Islam and the Philosophy of Science*, (Kuala Lumpur : ISTAC, 1989), H.9.

²⁶ S.M. Naquib al-Attas, *The Concept of Education in Islam*, (Kuala Lumpur : ISTAC, 1991), h.43.

²⁷ Ismail Razi al-Faruqi, *Islamization of Knowledge: Problems, Principles and Perspective*, dalam, *Islam : Source dan Purpose of Knowledge*, (Herndon : IIIT Press, 1988), h.30

Di kalangan intelektual muslim Indonesia tidak terlalu menaruh perhatian serius terhadap gerakan islamisasi hanya sedikit kalangan intelektual yang secara intens mewacanakan gagasan islamisasi seperti, M. Amin Abdullah, Mulyadi Kartanegara, Abdul Kadir Muslim dan Kuntowijoyo. Mulyadi Kartanegara sebelum mengetengahkan pentingnya islamisasi terlebih dahulu melakukan studi kritis terhadap kecenderungan perkembangan keilmuan di dunia Barat modern. Mulyadi berkesimpulan bahwa dunia Barat tidak saja telah melakukan sekularisasi dan dikhotomi ilmu akan tetapi telah jauh dari itu melahirkan manusia yang intelek tetapi kafir kepada Tuhan. Keilmuan modern telah menimbulkan persoalan-persoalan serius terutama dari sudut pandang teologis sehingga islamisasi ilmu perlu dilakukan.²⁸ Menurutnya islamisasi ilmu dapat dilakukan melalui integrasi ilmu-ilmu agama dan Umum dari aspek ontologism meliputi postulat tauhid sebagai prinsip utama, basis integrasi ilmu-ilmu agama dan umum, integrasi objek-objek kajian ilmu dan integrasi bidang ilmu. Sementara aspek epistemologis meliputi integrasi sumber ilmu, pengalaman manusia, metode ilmiah dan penjelasan ilmiah, dan aspek aksiologis meliputi ilmu teoritis dan praktis.²⁹

Sementara itu Amin Abdullah beranjak dari tantangan dunia kontemporer diantaranya *split personality, pluralism, anarkhisme, social disintegration*, sikap dan perilaku antarumat beragama. Amin menawarkan perlunya mewujudkan atau mengartikulasikan pergumulan dan dialog antara system berpikir filsafat Islam kontemporer dengan filsafat barat kontemporer secara konseptual dan *intelligible* dalam kontek kefilosofatan. Karenanya perlu

²⁸ Mulyadi Kartanegara, *Mengislamkan Nalar Sebuah Respons Terhadap Modernitas*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007), h. 9.

²⁹ Mulyadi Kartanegara, *Integrasi Ilmu Sebuah Rekonstruksi Holistik*, *Ibid*, h. 58.

integrasi ilmu secara interkonektif bercorak *teo-antroposentik*.³⁰ Hal ini menurutnya penting dan mendesak dilaksanakan untuk menghadapi kecenderungan perkembangan pemikiran postmodern yang menjadi tantangan PTAI, pemikiran keagamaan Islam dan pemikiran keamaan umumnya.³¹ Paling tidak ada tiga persoalan untuk menghadapi kecenderungan itu, pertama, ilmu-ilmu Islam klasik dipandang kurang siap merespon tantangan pluralisme agama dan budaya. Kedua, relevansi rasionalitas ilmu-ilmu klasik Islam yang disusun berabad-abad yang lalu sudah jauh berbeda dengan situasi yang dihadapi sekarang, karena itu perlu didekonstruksi. Ketiga, sikap dan perilaku keberagamaan umat Islam, bagaimana wajah keberagamaan, eksklusif atau inklusif?³²

Dalam hal merekonstruksi *integralisasi interkonektif* ilmu kekinian Amin menggunakan filsafat ilmu sebagai pintu dengan menyoroti aspek epistemologi ilmu keislaman misalnya terkait dengan relevansi penerapan teori-teori dan metodologi ilmiah. Hal ini penting dilakukan mengingat kedua bentuk falsafah tersebut masih terasa asing, apalagi mendialogkan keduanya secara intensif dalam rangka mengkonstruksi dan mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dan non agama secara *interkonektif* terutama di PTAI di Indonesia.³³ Walaupun ada pengkajian terhadap keduanya hal itu dilakukan secara terpisah bahkan dipertentangkan sebagaimana terjadi PTU dan PTAI. Misalnya PTU mengkaji filsafat Barat sedangkan di PTAI mengkaji filsafat Islam. Selama ini ilmu-ilmu terklasifikasi kepada ilmu-ilmu kealaman, ilmu-ilmu social, dan ilmu-ilmu humaniora serta ilmu-ilmu keagamaan yang berjalan sendiri-sendiri

³⁰ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), h. 401.

³¹ M. Amin Abdullah, *Ibid*, h. 344-346.

³² M. Arkoun, *Rethinking Islam Today*, (Washington : Center for Contemporary Arab Studies, 1987), h. 64-65.

³³ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies, Op. Cit*, h.392.

secara *dikhotomis-parsial atomistic* atau *single entity* atau nyaris tidak bersentuhan atau bertegur sapa *isolated entities*.

Secara praktis hal ini berdampak tidak pada pengklasifikasian ketiga ilmu tersebut akan tetapi lebih kepada persoalan terjadinya keterpecahan pengetahuan di kalangan mahasiswa dan dosen. Keterpecahan dan terfragmentasinya pengetahuan ini akan berdampak terhadap dunia birokrasi, dunia usaha dan dunia kerja lainnya.

Dalam konteks pembahasan bangunan ilmu-ilmu agama di PTAI secara epistemologis masih bercorak *dikhotomis-atomistik*. Sekalipun dalam satu rumpun ilmu-ilmu keagamaan tetapi dalam prakteknya tidak mau akur bahkan saling mendiskreditkan, mengkafirkan, sekuler men-sekulerkan antarpenganut epistemologi keilmuan masing-masing. Dengan menggunakan kerangka teori *trilogy paradigm* ilmu-ilmu keislaman yang dibangun M. Abid al-Jabiri, *bayani, burhani dan 'irfani*, Amin menegaskan agar sistem kefilsafatan ilmu-ilmu keagamaan tidak berdiri sendiri akan tetapi harus terintegrasi dan bersentuhan satu sama lain yang Ia sebut dengan *integral-interkonektif*.³⁴ Amin juga menegaskan pentingnya merekonstruksi istilah-istilah teknis epistemology *burhani* dan *irfani* dengan pemahaman baru untuk mendampingi epistemologi *bayani*.³⁵

Sebagai proyek keilmuaan, bahwa transformasi menuju UIN maka proyek reintegrasi epistemologi keilmuan umum dan agama akan dapat dimulai. Dialog dan kerja sama antar disiplin ilmu agama dan umum akan terjalin lebih erat. Pendekatan *interdisciplinary*, *interkoneksitas* dan *sensivitas* antarberbagai disiplin ilmu akan terus diupayakan secara *simultan*.³⁶ Konsekuensi pemikiran seperti ini maka fakultas tertentu tidak boleh menolak

³⁴ *Ibid*, h. 378

³⁵ *Ibid*, h.384

³⁶ *Ibid*, h. 401

matakuliah baru, melalui upaya penyusunan ulang matakuliah yang harus diregrouping atau diubah dan bahkan ditinggalkan sama sekali. Organisasi kurikulum, silabi dan matakuliah dilakukan sesuai dengan semangat reintegrasi epistemology keilmuan dengan mempertimbangkan saling keterkaitan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut, yaitu, *hadharah al-nash* (budaya agama yang hanya mengacu pada teks), *haadharah al-ilm* (budaya ilmu-ilmu teknis-empirik) dan *hadharah al-falsafah* (budaya etik emansipatoris, transformative liberatif) dan demikian sebaliknya. Karena itu pada penyusunan kurikulum dan silabi, UIN harus menghindari dari jebakan keangkuhan disiplin ilmu di luar dirinya.³⁷ Amin Abdullah menawarkan rancangan bangun keilmuan Baru yang bercorak interkoneksi di era UIN yang dibandingkan dengan era IAIN sebagai berikut:

Skema Single Entity



Entitas tunggal *Hadharah al-Nash* dapat diganti atau ditempati oleh entitas tunggal *Hadharah al-Ilm* atau entitas tunggal *Hadharah al-Falsafi*. *Single Entity* ini umumnya mengklaim bahwa dirinya sajalah yang mampu mengatasi permasalahan kemanusiaan. Dalam perpektif komparatif, corak berfikir *single*

³⁷ *Ibid*, h. 402-403

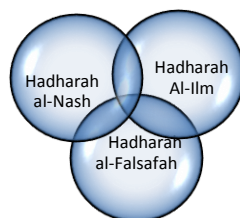
entity ini adalah symbol keangkuhan ilmu pengetahuan. Tidak ideal untuk IAIN apalagi untuk UIN.

Skema Bangunan Keilmuan Bercorak *Isolated entities*



Skema ini menggambarkan bahwa konstruk bangun keilmuan terpisah pisah tidak ada saling keterkaitan tanpa ada interkoneksi. Konstruk seperti ini akan melahirkan alumni yang memiliki wawasan dan pandangan yang sempit terlebih ketika berhadapan dengan realitas kehidupan. Konfigurasi yang bercorak *isolated* inilah yang diperkirakan menjadi sumber permasalahan dunia kontemporer dengan berbagai krisisny.

Skema *Interkonected entities*



Skema ini adalah skema proyek keilmuan era UIN yang menggambarkan bahwa setiap rumpun ilmu sadar akan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu perlu saling berdialog dan bekerja sama dan memanfaatkan metode dan pendekatan disiplin ilmu lain dan saling melengkapi kekurangan dan

kelebihan yang melekat dalam dirinya. Diperlukan upaya sungguh-sungguh dari berbagai pihak, dari waktu ke waktu dengan kesediaan mengorbankan kepentingan egoism sektoral keilmuan untuk menyongsong proyek keilmuan baru pada UIN.³⁸

Aksiologis

Sebagai institusi akademis dan religious UIN menghadapi tantangan utama bidang konsep keilmuan. Secara konsepsional di era postmodernism keilmuan mengalami pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) dan pergulatan sebagaimana pemikiran barat kontemporer. Di sisi lain UIN juga menghadapi tantangan idiologis yang sangat terkait dengan krisis kemanusiaan secara multi- dimensi munculnya anarkhisme, disintegrasi social, pluralism dan keterpecahan kepribadian masyarakat.

Secara kelembagaan dua tantangan di atas merupakan tanggungjawab UIN yang mesti direspon secara konkrit dengan memanfaatkan berbagai pendekatan yang bersifat multi-interdisipliner. Untuk menafsirkan sekaligus memberikan solusi terhadap realitas keberagaman umat islam dan keberagaman umat manusia secara umum. Nampaknya di sinilah letak urgensi dan pentingnya rekonstruksi Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Negeri (PTAIN) IAIN dan STAIN menjadi UIN. Karena selama ini IAIN dan STAIN masih mengembangkan pola keilmuaan yang *single entity* dan *isolated entities*. Dengan pengertian PTAIN selama ini masih mengajarkan dan mengembangkan pengkajian ilmu-ilmu keislaman yang bercorak sempit yang dibatasi oleh ruang-ruang epistemologi dan fakultas atau jurusan masing-masing. Konsekuensinya adalah mahasiswa dan alumni fakultas tertentu tidak mengenal dan memahami bahkan tidak peduli terhadap epistemologi

³⁸ *Ibid*, h.404-405

keilmuan fakultas dan jurusan lain. Kondisi ini semakin parah jika dikaitkan dengan paradigma ilmu-ilmu saintifik dan ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang dikuasai secara parsial, hal ini terlihat dari cara pemikiran keilmuan alumni PTAI. Artinya PTAI tidak dapat mengembangkan wawasan keilmuan alumninya akan tetapi sebaliknya yang terjadi adalah penyempitan wilayah ilmu-ilmu keagamaan, untuk tidak mengatakan bahwa sesungguhnya PTAI itu sendiri yang melestarikan "dikhotomi" itu. Hal ini sangat berdampak terhadap sikap dan perilaku alumni, tokoh aktivis gerakan sosial keagamaan di kampus-kampus secara khusus dan masyarakat muslim secara umum bahwa mereka gamang menghadapi realitas keilmuaan di luar dan di dalam dirinya. Mereka tidak percaya diri ketika bertatap muka, berdialog dan menghadapi dinamika di luar dirinya.³⁹

Selama ini PTAIN telah diberi mandate untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang diasuhnya namun hal ini belum mampu menjawab persoalan-persoalan epistemologi dan persoalan-persoalan kompleksitas kehidupan kontemporer. Karena itu transformasi IAIN kepada UIN menjadi sangat penting disebabkan alasan sebagai berikut. Pertama, UIN diasumsikan dapat menyelesaikan persoalan dualisme pendidikan dan dikhotomi ilmu-ilmu keagamaan, ilmu-ilmu umum. Kedua, UIN membuka peluang dan harapan baru bagi upaya keberlangsungan dan keterjaminan program rekonstruksi ilmu-ilmu keislaman secara integrative-interkonektif. Dengan harapan ilmu-ilmu keislaman dapat berdampingan saling mengisi dengan ilmu-ilmu modern dengan *platform* epistemologi dan filsafat keilmuan studi Islam dalam wajah baru.⁴⁰ Karena rumusan-rumusan ilmu-ilmu keagamaan klasik membutuhkan rumusan baru agar tidak kehilangan momentum dan relevansinya dengan

³⁹*Ibid*, h. 226.

⁴⁰*Ibid*, h. 226.

tantangan dan semangat zaman yang mengitarinya. Ketiga, dengan transformasi itu akan meningkatkan daya saing dan daya tampung UIN dengan ketersediaan fakultas dan program studi yang mengasuh berbagai disiplin ilmu.

Dalam konteks IAIN Jakarta perubahan itu paling tidak menurut Azra ada dua opsi pilihan yang akan ditempuh menuju konversi. Pertama, langsung mengubah dan mentransformasikan IAIN Jakarta yang dipandang cukup siap terutama dari segi SDM dan lingkungan akademis untuk menjadi UIN. Transformasi opsi ini melibatkan perubahan/ penyesuaian atau peningkatan fakultas-fakultas yang ada sekarang dan membentuk fakultas-fakultas baru yang sesuai dengan konsep dan kerangka UIN. Langkah transformasi ini mengandung beberapa masalah khususnya dalam penambahan prasarana, sarana dan SDM dalam bidang keilmuan tertentu khususnya ilmu umum.⁴¹

Kedua, membentuk jurusan-jurusan dan fakultas-fakultas baru dalam institusi IAIN sekarang sehingga secara substantif sesuai dengan kerangka UIN. Alternatif kedua ini menurutnya lebih sesuai dan mungkin lebih realistis untuk UIN Jakarta (IAIN dengan mandate lebih luas, *with wider mandate*) dari segi penyiapan prasarana, sarana dan SDM. Dalam konsep mandat lebih luas ini IAIN Jakarta telah dan akan membuka dan mengembangkan jurusan-jurusan umum, khususnya eksakta yang dalam tahap selanjutnya akan *di-upgrade* menjadi fakultas-fakultas. Untuk merealisasikan ini IAIN Jakarta sejak tahun 1998/1999 memulai program prioritas pada rekrutmen SDM dalam bidang-bidang yang akan dikembangkan.⁴²

Sebagai institusi akademis dan religious dengan mandate lebih luas tentu memerlukan model tertentu dilihat dari sisi epistemologi maupun secara

⁴¹ Azyumardi Azra, IAIN Di Tengah Paradigma Baru Perguruan Tinggi, dalam, Komaruddin dan Hendro, *Ibid*, h. 13.

⁴²*Ibid*, h. 14

kelembagaan. Hal ini semakin diperlukan untuk menjaga bidang-bidang agama yang selama ini menjadi karakter IAIN tidak termarginalisasi seperti terlihat dalam beberapa kasus karena ekspansi ilmu-ilmu umum. Dengan mandate seperti di atas setidaknya terdapat tiga model yang akan ditempuh.

Pertama, Model “Universitas al-Azhar” di mana fakultas-fakultas agama berdiri berdampingan dengan fakultas-fakultas umum. Fakultas-fakultas ini cenderung terpisah satu sama lain meskipun tetap satu payung. Kecenderungan model ini bahwa fakultas-fakultas umum lebih favorit, sementara fakultas-fakultas agama menjadi pilihan kedua atau terpinggirkan atau *peripheral*.

Kedua, Model Perguruan Tinggi Islam swasta yang ada di Indonesia seperti, UISU, UNISBA, UII Yogyakarta, dan seperti Universitas Muhammadiyah yang tersebar di Indonesia. Model Universitas-universitas ini fakultas umum berdampingan dengan fakultas agama secara terpisah. Fakultas agama terdiri dari jurusan-jurusan, sedangkan dalam institusi IAIN jurusan itu berbentuk Fakultas. Dalam model ini fakultas agama menjadi *peripheral* karena hanya ada satu fakultas agama.

Ketiga, Model Universitas Islam Antarbangsa (UIA) Kuala Lumpur. Dalam model ini ilmu-ilmu dibagi menjadi *revealed knowledge* Ilmu-ilmu kewahyuan yang melahirkan fakultas dan jurusan agama dan *acquired knowledge* ilmu perolehan yang selanjutnya diterjemahkan menjadi fakultas-fakultas atau jurusan-jurusan umum, seperti teknik, kedokteran, ekonomi, psikologi, antropologi dan sebagainya. Ilmu-ilmu ini selain di islamisasikan juga dilengkapi dengan subyek-subyek keislaman yang berkaitan.

Diantara tiga model di atas, manakah yang lebih sesuai untuk diterapkan dalam pengembangan IAIN menjadi UIN tentu masih membutuhkan

pembahasan dan diskusi lebih lanjut. Nampaknya menurut Azra model pertama dan ketiga lebih baik dibanding model kedua.⁴³

Dalam perspektif yang berbeda, menurut A.Qodry Azizy bahwa IAIN dapat mengembangkan beberapa jenis keilmuan tanpa harus mengubah nama. Dengan statusnya yang diberikan *with wider mandate* IAIN dapat mengembangkan tuntutan kualitas sebagai lembaga pendidikan sekaligus kajian untuk agama Islam, untuk mencetak ahli dalam ilmu-ilmu keislaman. Baik yang berorientasi pada akademik maupun professional. Dengan demikian kalau kajiannya menggunakan pendekatan disiplin ilmu lain, seperti ilmu social atau humaniora, hal itu masih dalam kerangka pendekatan sedangkan spesialisasi atau keahliannya tetap Ilmu Agama Islam. Dengan kata lain IAIN dapat mempersiapkan alumninya atau SDM untuk menjadi tenaga akademik dan professional dalam bidang ilmu-ilmu keislman tetapi juga harus ikut berkopetensi dalam mempersiapkan SDM dalam bidang ilmu lain yang mempunyai landasan keislaman yang kokoh. Karena itu tugas IAIN adalah mengembangkan ilmu-ilmu keislaman yang selama ini terbakukan dalam lima fakultas. Untuk itu ada dua sasaran yang akan dicapai, pertama, mengembangkan ilmu-ilmu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan dasar aqidah dan pengamalan islam. Kedua, mengembangkan ilmu-ilmu keislaman yang tidak saja terbatas pada ilmu-ilmu klasik dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Dengan cara ini IAIN akan dapat mengembangkan ilmu social Islam, ekonomi islam, politik Islam, manajemen Islam, perbankan Islam dan lain seterusnya. Jika pola ini yang dipakai maka IAIN jenis fakultas yang diwujudkan akan meliputi pelbagai disiplin keilmuan meskipun tetap

⁴³ Ibid, h. 14

menggunakan nama Institut, persoalannya adalah sangat tergantung dengan SDM sebuah Institut atau Universitas.⁴⁴

Qodri membandingkan pemikirannya dengan institute yang ada di Indonesia seperti, IPB dan ITB. Kedua Institut tersebut telah membuka disiplin ilmu lain. IPB membuka jurusan Sosiologi Pedesaan, Magister Manajemen yang secara keilmuan tidak ada kaitannya dengan pertanian. Sedangkan ITB membuka jurusan kesenian suatu disiplin yang berbeda dengan disiplin sains dan teknologi. Oleh karena itu Qodri menyarankan dua cara yang akan ditempuh, pertama, wadahnya disediakan terlebih dahulu. Dalam hal ini nama jurusan, program Studi atau fakultas dibuka lebih dahulu selanjutnya diisi dengan materi perkuliahan dan pengembangan keilmuan yang sesuai dengan fakultas dan jurusan tersebut. Kedua, menekankan pada esensi dan fungsi, bukan wadah. Jika ini yang digunakan maka yang lebih diutamakan adalah ketersediaan SDM Dosen dan Karya mereka. Ini dapat ditempuh dengan membentuk satu komite yang memiliki spesialisasi dan keseriusan dalam mengembangkan disiplin yang akan dikembangkan.⁴⁵

Dengan gambaran seperti itu Qodri menawarkan bentuk IAIN kedepan dengan tiga pola, pertama, mencetak 'ulama abad 21. Pola ini berupaya menjadikan IAIN sebagai lembaga pendidikan yang berfungsi mencetak tenaga ahli dalam ilmu-ilmu keislaman atau menjadikan ulama dan sekaligus menjadi pemimpin agama. Di sini amaliah dan kajian akademik menjadi satu kesatuan, jadi bukan melakukan kajian Islam semata-mata tanpa ada orientasi pada amaliah sebagaimana kajian di Barat. Pola ini, IAIN dianalogikan mirip pola *seminary* dan *divinity schools* untuk kajian agama Kristen di Barat.⁴⁶

⁴⁴ A.Qodri Azizy, Mengembangkan Struktur Kefakultasan IAIN, DALAM Komaruddin Hidayat, dan Hendro, Op.Cit., h.31.

⁴⁵ Ibid, h. 32.

⁴⁶ Ibid, h. 35.

Pola kedua, menjadikan IAIN sebagai perguruan Tinggi yang akan menyaingi tuntutan pasar dengan orientasi pada lapangan pekerjaan di pasar bebas. Pola kedua ini ditempuh dengan dua model, pertama, model umum (konvensional) seperti beberapa PT yang ada di Indonesia yaitu, UII, UIJ, UISU, Unisba, Uninsula dan Universitas Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Kedua adalah model khusus, seperti model Universitas antarbangsa (International Islamic University-IIU). Model kedua ini didesain untuk mewadahi fakultas dan jurusan yang sama dengan universitas pada umumnya dengan spesifikasi Islam, model inilah yang melahirkan Islamization of Knowledge. Yaitu upaya membangun ilmu-ilmu berangkat dari Islam atau ilmu-ilmu yang dikembangkan diusahakan dapat mendekatkan (*reapproachment*) ilmu Islam dan ilmu yang berasal dari dunia sekuler. Konsep inilah yang pada gilirannya melahirkan desakralisasi ilmu-ilmu Islam dan sakralisasi ilmu-ilmu sekuler.⁴⁷

Dengan demikian pola kedua ini lebih bertujuan pada pembentukan alumni yang siap dipasarkan di berbagai lapangan pekerjaan di tengah-tengah pasar bebas dengan lebih berperilaku Islami. Karena itu IAIN harus membuka semua fakultas dan jurusan yang biasa dibuka di universitas lain.

Pola ketiga, adalah pengembangan IAIN dalam bentuk kombinasi dari pola pertama dan pola kedua. Langkah awal adalah menciptakan IAIN sebagai lembaga pendidikan untuk mencetak ulama abad 21. Setelah mapan dan tampak hasilnya baru diterapkan pola kedua. Hal ini berarti bahwa kajian ilmu-ilmu keislaman menjadi modal dasar sekaligus landasan berdirinya sebuah Perguruan Tinggi yang nantinya akan membuka fakultas-fakultas dan jurusan yang di satu sisi dipersiapkan untuk memenuhi lapangan pekerjaan yang tersedia dan di sisi lain tetap dalam kerangka atau bahkan bermula dari

⁴⁷*Ibid*, h.37.

ajaran Islam. Pola ketiga ini hampir dekat dengan pola kedua dari model kedua sebagaimana disebut di atas. Pola ini sebaiknya memiliki otonomisasi dan berada pada satu kesatuan Perguruan Tinggi.⁴⁸

Agaknya pola ketiga ini hendak mengkonsepsikan IAIN sebagai PT yang mampu melahirkan alumni yang siap bersaing di pasar bebas dalam berbagai jenis lapangan pekerjaan. Sekaligus mampu menghasilkan pemikir Islam serta pemikir-pemikir social, humaniora, dan saintis yang berangkat dari ajaran Islam, atau setidaknya berlandaskan etika Islam. Dengan kata lain hendak menciptakan ilmuwan yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan profan yang selama ini dipandang nihil dalam ilmu-ilmu sekuler. Pada saat yang sama juga akan mampu mengisi kekosongan spiritual yang telah menimpa para ilmuwan sekuler.

Penutup

Secara praktis langkah dan terobosan rekonstruksi paradigma ilmu pengetahuan dengan pola integrasi dipelopori oleh Universitas Islam Negeri, namun unsur-unsur utama pembelajaran meliputi model kurikulum, ketersediaan SDM, kepustakaan, sarana dan prasarana manajemen dan lain-lain masih dalam tahap pencarian formulasi. Tugas yang diberikan Pemerintah sebagai *main mandate* dan *with wider mandate* merupakan peluang sekaligus menjadi tantangan. Karena secara faktual bahwa ternyata sistem penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih dualistik, yang satu berada di bawah Kementerian Pendidikan yang membina ilmu-ilmu non agama dan satu lagi berada di bawah naungan Kementerian Agama yang membina ilmu-ilmu keagamaan. Oleh karena itu upaya untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan

⁴⁸ *Ibid*, h. 38.

di lingkungan UIN tentu masih berada dalam tahapan *on going process* dan *on going formulation*.

Kendatipun dalam proses pencarian, karena transformasi IAIN kepada UIN merupakan proyek keilmuan maka langkah penting adalah mengubah bangunan ilmu pengetahuan yang dikhotomik menjadi bangunan keilmuan yang baru bercorak integralistik. Dengan demikian, sarjana yang akan dilahirkan akan memiliki kemampuan akademik, inovatif dan mampu menjadi pemandu umat dalam semangat keilmuan dan keagamaan. Dalam konteks Pendidikan Islam, integrasi ilmu akan berimplikasi secara kelembagaan dari institute menjadi Universitas.

Referensi

- Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (Ed), *Problem dan Prospek IAIN Antologi Pendidikan Tinggi Islam*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2000.
- Unesco, *World Declaration on Higher of Education*, Adopted by the World Convergence on Higher Education in the Twenty-First Century, 9 October 1998
- M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Jilid. I
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Terjemahan Franz Rosenthal, New Jersey: Princeton University Press, 1981
- Mulyadi Kartanegara, *Menislamkan Nalar Sebuah Respon terhadap Modernitas*, Jakarta: Erlangga, 2007

- Mulyadi Kartanegara, *Integrasi Ilmu Sebuah Rekonstruksi Holistik*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005
- S.M. Naquib al-Attas, *Islam and Scularism*, Kuala Lumpur: ISTAC, 1993
- _____ *Islam and the Philoshopy of Science*, Kuala Lumpur: ISTAC, 1989
- _____ *The Concept of Education in Islam*, Kuala Lumpur: ISTAC,1991
- _____ *Prolegomena to the Metaphisies of Islam : An Expotition of the Fundamental Elements of the Worldvoieu of Islam*, Kuala Lumpur: ISTAC, 2001
- M. Arkoun, *Rethinking Islam Today*, Center for Contemporary Arab Studies, 1987
- C.A. Qadir, *Philoshopy and Science in the Islamic World*, London: Routledge, 1988
- Rosnani Hasyim and Imran, *Islamization of Knowledge : A Comparative Analysis of the Conception of al-Attas and al-Faruqi* dalam *Journal Intellectual Discource*, 8:1, 2000
- Rosnani Hasyim, *Gagasan Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer, Sejarah Perkembangan dan Arah Tujuan, dalam, Islamiah, Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Tahun, I, NO. 6, Juli- September, 2005
- Ismail Razi al-Faruqi, *Islamization of Knowledge, Problems, Principles, and Perspective, dalam, Islam, Source and Purpose of Knowledge*, Herndon : IIIT Press, 1988